

DAFTAR PUSTAKA

- _____, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007*. (2008). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional*. (2007). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017*. (2016). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 *Tentang Klasifikasi Anggaran*. (2011). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*. (2005). Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2005). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. (2003). Jakarta.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. (2000). Jakarta.

Ariani, R.K & Putri, A.G. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784. hlm 364-369.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2015. BPS Jawa Barat.

Erstelita & Darwis, R.T. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Universitas Negeri Padang. hlm 1 – 23.

Darmayasa, N.I dan Bagiada, M.I. (2013). Pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak sebagai penopang kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.09 No.02. Politeknik Negeri Bali.hlm 121-129.

Dwirandra, A.A.N.B. (2008). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002 – 2006. *Jurna Ilmiah*. Universitas Udayana. Hlm 01 - 21.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadi, N. (2014). *Corporate social responsibility*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4, Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). *Teori akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juri, M.H. (2012). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Jurnal EKSIS*. Vol.08 No.01. hlm 2020 – 2031.
- Kadafi, M dan Putra, W.W. (2013). Kemandirian keuangan daerah (studi kasus Pemerintah Kota Samarinda tahun 2001-2010). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-2*. hlm 1-14.
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma bisnis & akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Latan, H. (2014). *Aplikasi analisis data statistik untuk ilmu sosial sains dengan IBM SPSS*, Bandung: Alfabeta.
- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. (2016). *Akutansi sektor publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marizka, R. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). Universitas Negeri Padang. hlm 2 – 22.
- Naganathan, M & Sivagnanam, J.K. (2000). 'Federal transfer and the tax effort of the states in India'. *Indian Economic Journal*. Vol. 47 No. 04. University of Madras. hlm 252-281.

- Nggilu, F., Sabijono, H. & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.16 No.04. Universitas Sam Ratulangi Manado.hlm 623-635.
- Novalistia, L.R. (2016). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Accounting*. Vol.02 No.02. Universitas Pandanaran Semarang. hlm 1 – 25.
- Tahar & Zakhiya. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12, No. 01. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm 88-99.
- Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.hlm 2-48.
- Raharjo, E. (2007). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*.Vol. 2, No. 1.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, I.K. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). Universitas PGRI Yogyakarta. Hlm 1 – 12.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2011). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS
- Wong, D.J. (2004). ‘The fiscal impact of economic growth and development on local government capacity’. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol.16, No. 03. hlm 413-42.